

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara internasional, kebijakan olahraga seringkali memiliki dua fokus, olahraga elit dan tingkat partisipasi masyarakat (Eime, Harvey, and Charity 2020). Namun meningkatnya minat pemerintah terhadap olahraga elit merupakan salah satu ciri dominan pada perkembangan olahraga kontemporer (Zheng et al. 2019) kesuksesan olahraga elit di banyak negara, telah menjadi aspek yang paling khas dari kebijakan olahraga nasional dan merupakan “prioritas yang tak tertahankan” (Lyle 2015) dan bahkan Olahraga elit adalah bagian penting dari budaya dan identitas sebagian besar negara dan kesuksesan internasional dalam olahraga sangat dihargai (Koski and Lämsä 2015). Australia merupakan salah satu negara yang pada awalnya berfokus pada olahraga elit sebagai akibat hasil buruk pada olimpiade 1976 dan 1980, serta Keputusan Komite Olimpiade Internasional pada tahun 1993 untuk memberikan Olimpiade 2000 ke Sydney. Hal ini memiliki pengaruh yang besar pada kecepatan dan arah organisasi kebijakan olahraga federal, administrasi dan alokasi pendanaan sepanjang tahun 1990-an; keputusan, lebih lanjut, yang semakin memperkuat lobi olahraga elit di Australia (Green and Collins 2008).

Berbeda dengan Australia, Finlandia telah mengkonseptualisasikan “pengembangan olahraga” sebagai sarana untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama dan didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga (Green and Collins 2008) selaras dengan Isu pembangunan olahraga oleh PBB sejak dikenalnya istilah *‘Sport for all’*, merupakan hasil dari deklarasi UNESCO’78 yang kemudian menjadi salah satu elemen pada instrumen pembangunan dalam *Milenium Development Goals* (MDGS) periode 2000-2015 serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada periode 2015-2030 dengan balutan *Sport Development and Peace* (SDP) (Amung,2020). Olahraga dipercaya sebagai solusi oleh HMG untuk isu-isu ‘jahat’ lintas sektoral nasional melalui : 1. Membantu meningkatkan kesehatan mental dan fisik; 2. Menyediakan lapangan

pekerjaan dan pendapatan sebagai bagian dari regenerasi ekonomi khususnya dikota-kota dan juga di pedesaan; 3. Berkontribusi pada pembelajaran sepanjang hayat; 4. Meningkatkan kohesi sosial antara kelompok budaya dan sosial yang berbeda; 5. Mengurangi ketidakpuasan dan kejahatan pemuda (Beacom and Levermore 2008).

Kesuksesan olahraga ditingkat internasional diklasifikasikan menjadi 3 (Tiga) tingkatan, yaitu: makro, meso, dan mikro. Faktor tingkat makro mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya dimana seseorang hidup, termasuk ekonomi, demografi, geografi dan iklim, urbanisasi, politik, dan budaya nasional. Faktor tingkat meso mempengaruhi lingkungan kebijakan negara. Pada tingkat mikro adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan individu atlet, mulai dari pengaruh gen yang diwariskan hingga pengaruh sosial dari orang tua, teman, dan pelatih (De Bosscher et al. 2017). Pelaksanaan pembangunan olahraga pada dimensi olahraga prestasi oleh Australia dan dimensi olahraga rekreasi oleh Finlandia membuktikan bahwa sejarah dan konteks politik masing-masing negara, warisan institusi, dan nilai-nilai sosial kolektif berpengaruh pada “politik yang menentukan kebijakan” (Green and Collins 2008), maka dari itu faktor Meso sangat mempengaruhi bagaimana olahraga suatu negara dapat berpeluang sukses di tingkat internasional.

Kebijakan Politik seringkali dikatakan merupakan sebuah kebijakan publik. Adapun kebijakan publik adalah seperangkat keputusan pemerintah tentang isu tertentu dikembangkan oleh proses dan peranannya yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan dan strategi pembinaan olahraga daerah maupun nasional. Kebijakan publik dalam olahraga perlu diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) diartikan sebagai pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan, termasuk pertumbuhan dari budaya, olahraga daerah itu sendiri. (Febrisius Soan 2017).

literatur olahraga elit saat ini melaporkan bahwa pengembangan olahraga elit ditandai dengan meningkatnya pelembagaan, keterlibatan pemerintah, dan homogenisasi (Green and Houlihan 2005). Maka dari itu, kebijakan pembangunan olahraga tidak akan lepas dari pendanaan yang harus disiapkan guna mencapai

tujuan. Clumpner (1994) menggunakan karya Broom (1991) sebagai landasan dan menyarankan tiga faktor utama yang bertanggung jawab atas keberhasilan internasional: (1) dukungan keuangan untuk pusat pelatihan dan personel, (2) sistem olahraga Olimpiade terintegrasi yang berkelanjutan dan (3) bakat Atletik (De Bosscher et al. 2016). Salah satu proyek yang paling komprehensif dari faktor tingkat kebijakan yang mempengaruhi kesuksesan olahraga internasional yang secara empiris menguji sebuah model di enam negara adalah model Faktor Kebijakan Olahraga yang Mengarah pada Model Keberhasilan Olahraga Internasional (SPLISS), Model SPLISS mengelompokkan semua faktor dalam kebijakan olahraga yang dapat berkontribusi pada keberhasilan (output) dalam 9 (sembilan) pilar diantaranya (1) *Financial Support*; (2) *Governance, Organisation, and Structure Of Sport Policies*; (3) *Foundation and Participation*; (4) *Talent Identification and Development*; (5) *Athletic and Post-Career Support*; (6) *Training Facilities*; (7) *Coach Provision and Coach Development*; (8) *National and International Competition/Event*; dan (9) *Science Research And Innovation* (De Bosscher et al. 2017).

Meskipun strategi pendanaan olahraga dapat melalui strategi cabang olahraga prioritas medali atau pendanaan semua cabang olahraga, kenyataannya yang berhasil pada sebuah event olahraga, memprioritaskan investasi olahraga elit mereka, temuan tersebut tidak mengonfirmasi bahwa memprioritaskan adalah strategi pendanaan yang efisien, karena di antara negara-negara yang berhasil, kami menemukan baik yang memprioritaskan maupun yang melakukan diversifikasi (De Bosscher, Shibli, and Weber 2019) hal ini semakin memperkuat bahwa tidak ada cetak biru yang mapan yang dengannya negara dapat mengembangkan kesuksesan olahraga elit (De Bosscher et al. 2017). Namun fakta yang ditemukan terkait pendanaan olahraga adalah bahwa di Inggris Raya, empat cabang olahraga yang menerima 44,2% dari dana menyumbang 59% dari kesuksesan negara. Di Australia 65,9% dari ketiga penampilan teratas dicapai oleh empat cabang olahraga yang menerima 44,6% dana; dan 89,6% keberhasilan diraih oleh delapan cabang olahraga yang mendapatkan dana 74,6%. Singkatnya, negara-negara ini tampaknya memiliki hubungan antara pendanaan dan kesuksesan yang efisien untuk olahraga utama (De Bosscher et al. 2019).

Sementara itu landasan pembangunan olahraga Indonesia dimulai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang mengamanatkan pengembangan olahraga Prestasi, Rekreasi dan Pendidikan (UU No 3 Tahun 2005 2005), dalam pasal 11 menyampaikan pelaksanaannya pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pembangunan olahraga di daerah dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2007 diantaranya Nomor 16 tahun tentang Penyelenggaraan keolahragaan, PP Nomor 17 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan PP Nomor 18 tentang Pendanaan Olahraga.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengembangan olahraga di daerah, dengan pengembangan olahraga Prestasi, Rekreasi, Pendidikan, Disabilitas dan Aparatur Sipil Negara, maka merujuk pada hal itu, karena *Locus* Penelitian ini berada di Provinsi Jawa Barat, maka dimensi pengembangan yang diteliti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2019) oleh karena itu, turunan dari RPJPN adalah RPJPD yang dibuat oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk periode 2005-2025 atau kurang lebih 20 Tahun. Isu strategis dalam 20 (dua puluh) tahun (2005-2025) di Provinsi Jawa Barat, yaitu: (1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya, (2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, (3) Pengangguran dan ketenagakerjaan; (4) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial, (5) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, (6) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur, (7) Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat, dan

(8) Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah. Prioritas pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada pencapaian kemandirian pemuda melalui upaya peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan, serta peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif sehingga mampu mensejahterakan dirinya juga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Sementara untuk pembangunan olahraga dalam mempertahankan keunggulan prestasi olahraga Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Provinsi Jawa Barat melalui upaya-upaya peningkatan pembinaan olahragawan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga melalui, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan olahraga dalam rangka perwujudan pemuda mandiri. (Barat n.d.).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun, pemerintah membagi menjadi fase 5 tahunan, atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berada pada fase ke 4 yakni Kemandirian Masyarakat Jawa Barat, sebagaimana tercantum didalam buku RPJMD Pemerintah Jawa Barat tahun 2018-2023 (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2019). RPJMD tersebut menjadi dasar dari seluruh perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), termasuk Dispora Jawa Barat yang memiliki urusan Kepemudaan dan Olahraga. Untuk Mendukung Capaian Kinerja Gubernur Jawa Barat Periode 2019-2023, maka disusunlah Renstra Dispora (Dispora 2018) dengan target sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rencana Strategis Dispora Jabar Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Partisipasi	Meningkatnya Partisipasi	Angka Partisipasi Masyarakat	Persen	52	52	56	58	60

Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus	Berolahraga (APMO)						
	Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Peringkat					
		a. PON			1			
		b. PEPARNAS			1			
		c. POPNAS		1		1		1
		d. POPWILNAS			1		1	
		e. PEPARPENAS		1		1		

Untuk mencapai target pada Tabel 1.1 diatas, dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga baik Prestasi, Rekreasi, maupun Disabilitas, Dispora Jawa Barat dibantu oleh Induk Organisasi Olahraga Daerah Provinsi sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah (PERDA) Jawa Barat no 1 Tahun 2015 Pasal 22 ayat 1, pasal 30 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1 (Jawabar 2015). Dalam hal ini organisasi yang membantu capaian kinerja tersebut adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Jawa Barat, dan National Paralimpic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat melalui mekanisme Bantuan Hibah Organisasi dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum didalam Pergub Jabar nomor 13 Tahun 2021 pasal 3 ayat 1 (JABAR 2021), yaitu:

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Provinsi Jawa Barat ditetapkan oleh kemenpora sebagai sentra Pembinaan Talenta Muda dalam Desain Besar Olahraga Nasional (Pamungkas 2022) karena dianggap sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang prestasi olahraganya Pesat dengan indikator sebagai Provinsi dengan persentase atlet terbanyak yang membela Indonesia pada Asian Games 2018 yakni 175 orang dari total atlet sebanyak 929 orang atau sekitar 18,83 % dengan capaian medali emas yang direbut atlet Jawa Barat sebanyak 31 medali emas dari total 98 medali emas atau 31,64 % (Jabar 2018), selanjutnya Juara pada ajang PON tahun 2016 dan tahun 2021 dan Juara Peparnas tahun 2016 dan Runner Up tahun 2021 (Asep Syahmid 2021), Juara Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) tiga kali berturut turut pada tahun 2015, 2017 dan 2019 (TEMPO 2019), Juara Pekan Olahraga dan Seni antar Pesantren Nasional (POSPENAS) tahun 2019 (Hartifany Praisra 2019) dan Juara Pekan Olahraga Tradisional tingkat Nasional Tahun 2021 (Kemenpora 2021) tentunya menjadi sebuah bukti nyata kalau pembinaan olahraga di Jawa Barat telah berada dalam alur yang tepat.

Merujuk pada penjelasan bagaimana kebijakan olahraga dibuat oleh pemerintah Indonesia yang terangkum didalam RPJPN , RPJMN dan Rencana Strategis Dispora Jawa Barat (Tabel 1.1) serta bagaimana perkembangan olahraga Provinsi Jawa Barat begitu pesat, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendanaan Olahraga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Capaian Strategis pada tahun 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan umum pada penelitian ini adalah bagaimana pendanaan olahraga digunakan untuk mencapai target rencana strategis Dispora Jawa Barat tahun 2019-2021, dikarenakan pada tahun 2022 adanya perubahan isu strategis di nasional yang lebih fokus pada Indeks Pembangunan Pemuda, oleh karena itu penelitian ini masih merujuk UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Perda Jabar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka dari itu batasan kajian didalam

Dicky Waluya Badrukamal, 2023

STUDI KASUS KEBIJAKAN PENDANAAN OLAHRAGA PADA APBD JAWA BARAT TERHADAP CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DISPORA JABAR 2019-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitian ini adalah merujuk pada pengembangan olahraga berdasarkan perda jabar yaitu prestasi, Rekreasi dan Disabilitas yang dituangkan didalam Renstra Dispora Jabar 2019-2023. Berdasarkan hal tersebut, maka pada rumusan masalah disampaikan beberapa pertanyaan yang merujuk pada target Renstra itu sendiri, yaitu :

1. Apakah Kebijakan Pendanaan Olahraga APBD Jawa Barat dapat mencapai Target Kinerja Rencana Strategis pada Event Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) tahun 2019?
2. Apakah Kebijakan Pendanaan Olahraga APBD Jawa Barat dapat mencapai Target Kinerja Rencana Strategis pada Event Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) tahun 2019?
3. Apakah Kebijakan Pendanaan Olahraga APBD Jawa Barat dapat mencapai Target Kinerja Rencana Strategis pada Event Pekan Olaharga Nasional (PON) 2021?
4. Apakah Kebijakan Pendanaan Olahraga APBD Jawa Barat dapat mencapai Target Kinerja Rencana Strategis Event Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) 2021?
5. Apakah Kebijakan Pendanaan Olahraga APBD Jawa Barat dapat mencapai Target Kinerja Rencana Strategis Angka Partisipasi Pengukuran Masyarakat Berolahraga (APMO) tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi tentang Kebijakan Pendanaan untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis Event POPNAS dan PEPARPENAS Tahun 2019.
2. Untuk memperoleh informasi tentang Kebijakan Pendanaan untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis Event PON dan PEPARNAS Tahun 2021.
3. Untuk memperoleh informasi tentang Kebijakan Pendanaan untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis meningkatnya APMO Jawa Barat Tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis, praktis maupun sosial, diantaranya:

- 1) Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan pendanaan olahraga melalui mekanisme Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka peningkatan prestasi pelajar dan pelajar disabilitas.
- 2) Melalui informasi dari hasil penelitian ini, dapat terbentuk sinergitas kebijakan pendanaan antar Perangkat Daerah yang menangani urusan keolahragaan dan Pendidikan untuk mendukung peningkatan prestasi pelajar dan pelajar disabilitas.
- 3) Melalui informasi dari hasil penelitian ini, keberlanjutan kebijakan Pendanaan Olahraga Prestasi tingkat Senior dan Disabilitas Senior melalui melalui mekanisme Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD) pada perangkat daerah yang menangani keolahragaan dan mitra organisasi olahraga dapat terukur sesuai target kinerja.
- 4) Kebijakan Pendanaan terkait pemassalan olahraga serta pengukuran Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) perlu diketahui oleh semua kalangan, termasuk mahasiswa olahraga yang akan menjadi tenaga keolahragaan ditengah masyarakat untuk meningkatkan partisipasi berolahraga.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Struktur organisasi dalam penelitian berisi tentang rincian urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam penelitian, diawali Bab I hingga Bab V.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang melatarbelakangi penelitian ini dibuat, yaitu memuat tentang Olahraga Elite, Olahraga Massal, Kesuksesan Olahraga, Kebijakan Politik, Kebijakan Olahraga, Pendanaan Elite Sport, Sejarah Kebijakan Olahraga, Pembagian Kewenangan tugas Pengembangan Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Jawa Barat, Isu Strategis Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat fase ke 4 (Empat), Rencana Strategis (Renstra) Dispora Jabar 2019-2023, Mitra Organisasi Olahraga, Pemilihan Jawa Barat

Dicky Waluya Badrukamal, 2023

STUDI KASUS KEBIJAKAN PENDANAAN OLAHRAGA PADA APBD JAWA BARAT TERHADAP CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DISPORA JABAR 2019-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai Sentra Pembinaan Talenta Muda DBON. Selanjutnya rumusan masalah berdasarkan Kebijakan Pendanaan Olahraga APBD Jawa Barat untuk mencapai target kinerja renstra Event POPNAS, PEPARPENAS, PON, PEPARNAS dan pengukuran APMO. Serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang disusun oleh peneliti.

Bab II berisikan tentang literatur yang di kutip oleh peneliti yang terdiri dari teori, konsep serta kajian pustaka yang berkaitan dengan Kebijakan menurut para ahli, kebijakan pakar olahraga terkait pembangunan olahraga, Kebijakan pendanaan berdasarkan urusan Pemerintah Nasional, Pendanaan Olahraga, APBD Jawa Barat, RPJP, RPJM, Renstra Dispora, Penelitian yang relevan dan Kerangka Pemikiran.

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian menggunakan Design kualitatif pendekatan studi kasus, dimana Partisipan berasal dari Dispora Jabar, KONI, KORMI, NPCI, dan lokasi penelitian bertempat di Kota Bandung, metode pengumpulan data ini melalui studi dokumentasi, Observasi dan Wawancara, dan data dianalisis berdasarkan fakta hasil wawancara dan studi dokumentasi

Bab IV memaparkan temuan-temuan penelitian terkait dengan studi kasus kebijakan pendanaan olahraga pada APBD Jawa Barat terhadap capaian rencana strategis DISPORA Jabar 2019-2021. Hasil temuan tersebut kemudian dibahas menggunakan teori-teori atau kajian literatur.

Bab V merupakan bagian dari kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Bagian ini menyimpulkan hasil dari temuan dan pembahasan kemudian hasil dari kesimpulan ini diharapkan peneliti dapat bermanfaat bagi khalayak banyak yang ditulis pada implikasi dan bagian rekomendasi memaparkan saran dari peneliti kepada beberapa pihak